

Penguatan Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas, dan Transparansi

Mellani Yulastina¹, Dara Andanti Maulida², Wia Rizqi Amelia³ Alfian⁴

Program Studi Akuntansi, Universitas Lambung Mangkurat

ARTICLE INFO

Article history :

Received: 06 Januari 2025

Revised: 22 Maret 2025

Accepted: 21 April 2025

Keywords:

Kejelasan Sasaran Anggaran,
Akuntabilitas, Transparansi,
Pengelolaan Keuangan,
Kinerja Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Barito Kuala.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner ber-skala Likert. Sampel penelitian terdiri dari 44 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kebaruan: Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyoroti konteks spesifik Kabupaten Barito Kuala yang memiliki karakteristik ekonomi non-pertambangan. Penggabungan ketiga variabel ke dalam satu model penelitian memberikan wawasan baru terkait determinan kinerja pemerintah daerah dalam konteks lokal yang belum banyak dieksplorasi.

Implikasi: Studi ini memperkaya literatur akuntansi sektor publik dengan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan publik.

Objective: This study aims to empirically examine the influence of budget goal clarity, accountability, and financial management transparency on the performance of the regional government in Barito Kuala Regency.

Methodology: A quantitative approach was employed, utilizing primary data collected through a Likert-scale questionnaire. The sample consisted of 44 local government work units (SKPD) selected through purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 25.

Findings: The findings reveal that budget goal clarity and accountability have a significant positive effect on regional government performance, whereas financial management transparency does not significantly influence performance.

Originality/Value: This study contributes by focusing on the unique context of Barito Kuala Regency, a region with a non-mining-based economy. The integration of the three variables into a single empirical model offers fresh insights into the key factors affecting regional government performance in underexplored local settings.

Implications: The study enriches the public sector accounting literature by providing evidence on how budget goal clarity and accountability enhance regional government performance. The findings also offer practical implications for policymakers in improving public financial management at the local level.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Dara Andanti Maulida,

Program Studi Akuntansi, Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email Korespondensi: 2010313220005@mhs.ulm.ac.id

Pendahuluan

Administrasi yang baik menjadi elemen esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Tuntutan masyarakat semakin kuat agar para pejabat negara mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala masih menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya mencapai predikat akuntabilitas kinerja yang lebih tinggi. Meningkatnya keterbukaan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah memicu gejolak yang bermula dari kekecewaan. Tuntutan yang semakin meningkat diajukan agar para pejabat negara bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka (Mahsun, 2018a). Dalam konteks global, *good governance* sangat berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas publik yang menjadi pilar utama dalam mencegah maladministrasi dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat (Bovens et al., 2014; Fukuyama, 2013). Ketika pemerintah gagal memenuhi ekspektasi ini, risiko ketidakpuasan publik dan krisis kepercayaan akan semakin besar (Hodge & Greve, 2007).

Tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dalam kerangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Pertanggungjawaban dapat menjadi tanda komitmen instansi untuk senantiasa mencermati keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Harianto dkk., 2021). Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pemerintah (LAKIP) dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan rencana-rencana utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pada masing-masing perangkat daerah, serta pencapaian capaian-capaian yang telah dicapai saat ini untuk mempercepat peningkatan mutu capaian pelaksanaan yang diharapkan pada tahun yang akan datang (Hasanah, 2021).

Alat utama dalam menjalankan misi dan rencana pembangunan, anggaran publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai representasi nyata dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan, di mana setiap proses penganggaran harus disusun secara jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemerintahan daerah seperti Kabupaten Barito Kuala, yang memiliki ketergantungan tinggi pada anggaran publik untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan, efektivitas pengelolaan anggaran menjadi sangat menentukan keberhasilan program-program pembangunan lokal. Anggaran yang dirancang tanpa memperhatikan prinsip akuntabilitas berisiko menciptakan inefisiensi dan ketidaktepatan sasaran, sementara kurangnya transparansi dapat mengikis kepercayaan publik dan memicu gejolak sosial. Oleh karena itu, anggaran publik memegang peran strategis sebagai sarana yang tidak hanya mengarahkan sumber daya, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan administratif pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya (Andrews & Hill, 2003; Ezzamel et al., 2014; Hood, 2010).

Menurut Mahsun (2018a) pengelolaan keuangan daerah mengacu pada prinsip *value for money* yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis artinya pengeluaran atau biaya terendah untuk biaya masukan dengan kualitas tertentu. Efisien artinya pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Sedangkan efektif artinya pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Pengelolaan anggaran dan keuangan daerah secara efisien dan efektif merupakan tanggung jawab seluruh instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Peran anggaran sangat penting dalam lingkup pemerintahan, terutama dalam tanggung jawabnya.

Menurut Kenis (1979) sistem anggaran memiliki beberapa karakteristik, salah satu ciri anggaran adalah kejelasan anggaran. kejelasan sasaran anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran dan efektif. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan untuk tujuan yang konkret dan dapat diukur. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran

anggaran dimasukkan dalam rencana strategis daerah (renstrada) dan program pembangunan daerah (propeda) (Pratiwy, 2013). Kejelasan sasaran anggaran membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran dapat mencapai tingkat kinerja (Laksana & Handayani, 2014). Penelitian Desiana et al., 2018; Mulyadi AR et al., 2018; Yulianto & Muthaher, 2019b mengatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian, hasil penelitian tidak sejalan dengan Sirande dkk. (2022) yang mengatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Selain kejelasan anggaran, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah juga sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bagaimana anggaran daerah digunakan dan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menerapkan prinsip tanggung jawab pengelolaan keuangan, pengurus harus memikul tanggung jawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua tindakan atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengurus (Qodariah, 2017). Oleh karena itu, semakin besar tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

Beberapa hasil penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah ditemukan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020) mengemukakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah kota. Dengan demikian hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Binawati dkk. (2022), Ambarwati (2021) yang menyatakan akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020) dan Sihombing & Arsani (2020) menunjukkan bahwa variabel transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hasil penelitian tersebut tidak mendukung penelitian yang dilakukan Binawati dkk. (2022) yang mengatakan bahwa variabel transparansi tidak mempengaruhi kinerja pemerintah kota.

Penulis dalam penelitian ini memilih salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia yaitu Kabupaten Barito Kuala sebagai objek penelitian. Dikutip dari laman Media center Portal Berita Kalimantan Selatan (2023), Kabupaten Barito Kuala menduduki peringkat 3 di Provinsi Kalimantan Selatan dalam Akuntabilitas Kinerja dengan nilai 68,94 (B), diikuti oleh Kabupaten Tapin pada peringkat 4 dengan nilai 68,93 (B), dan peringkat 5 adalah Kabupaten Tabalong dengan nilai 68,37 (B). Dari ketiga Kabupaten diatas, Barito Kuala sebagai kabupaten *non mining* dibandingkan dengan Kabupaten Tapin dan Tabalong yang mana kedua kabupaten ini memiliki sumber pendapatan signifikan dari sektor pertambangan, khususnya batu bara sehingga pendapatan dari sektor ini memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan, namun mempunyai skor akuntabilitas kinerja di bawah Kabupaten Barito Kuala yang secara nyata pendapatan utama bukan dari sektor pertambangan akan tetapi dari sektor pertanian, perikanan dan jasa.

Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Barito Kuala ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala memiliki sistem manajemen kinerja yang lebih baik dan transparan dari hasil pengelolaan keuangan dan kinerja programnya sehingga memiliki penilaian akuntabilitas kinerja lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tabalong dan Tapin. Berikut adalah hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah selama 6 tahun terakhir yang diperoleh Kabupaten Barito Kuala:

Tabel 1. Nilai SAKIP Kabupaten Barito Kuala

Tahun	Nilai	Predikat
2023	68,53	B
2022	68,94	B
2021	66,88	B
2020	66,53	B
2019	63,23	B
2018	54,56	CC

Sumber: Data dibuat oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa evaluasi SAKIP pada instansi pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tabel di atas menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Akan tetapi terjadi penurunan nilai yang didapatkan pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023. Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui surat Nomor: B/487/AA.05/2023 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala mengatakan bahwa

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan belum optimal, dan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan. Pada tahun 2023, hasil penilaian kinerja Pemerintah Daerah Barito Kuala memperoleh nilai 68,53 dengan predikat "B". Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kinerja "Baik" khususnya kinerja AKIP sudah baik di lingkungan Pemerintah Daerah dan beberapa satuan kerja perangkat daerah, namun masih perlu adanya komitmen untuk melakukan peningkatan dalam pelaksanaan administrasi kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kab. Barito Kuala Tahun 2023

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	23,86	23,80
b. Pengukuran Kinerja	30	20,16	20,08
c. Pelaporan Kinerja	15	10,49	10,40
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,43	14,25
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,94	68,53
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber: Surat Hasil Evaluasi AKIP Kab. Batola Nomor: B/487/AA.05/2023

Berdasarkan rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala masih belum bisa mengoptimalkan hasil komponen yang dinilai untuk mendapat predikat memuaskan pada SAKIP yaitu predikat A dengan skor minimal yang harus diperoleh yaitu 80 – 90. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala masih dihadapkan pada banyak persoalan yang menjadi permasalahan dalam mencapai kondisi di atas. Adapun permasalahan-permasalahan yang dimaksud antara lain sebagai berikut: (1) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala; (2) Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga masih ditemukan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tanpa adanya perencanaan yang jelas dan terukur.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui pendekatan kuantitatif yang mengeksplorasi bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Penggabungan variabel-variabel ini menyajikan pembahasan yang lebih menyeluruh tentang bagaimana kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini memberikan perspektif yang sangat relevan berkaitan dengan tuntutan masyarakat kepada pemerintah terhadap penyelenggaraan administrasi publik yang memicu timbulnya gejala yang berakar pada ketidakpuasan, memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, memberikan pemahaman yang lebih terkini dan relevan.

Hasil kajian ini mampu menyajikan pembahasan yang luas kepada para akademisi dan pemerintah terkait pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya berdampak pada pertanyaan masyarakat tentang kinerja pemerintah daerah. Selain itu, secara teoritis kajian ini berkontribusi pada referensi ilmu akuntansi yang memberikan penjelasan bagaimana kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan pemaparan fenomena di atas serta adanya gap research, penulis mengambil variabel dependen kinerja pemerintah daerah dan variabel independent kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Objek yang diambil pada penelitian ini adalah 44 SKPD Kabupaten Barito Kuala.

Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

Teori Stewardship

Stewardship theory menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai pengelola (*steward*) dan masyarakat sebagai pemberi amanah (*principal*). Dalam konteks organisasi sektor publik, pemerintah

memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengelola sumber daya demi kepentingan masyarakat (Davis et al., 1997).. Teori ini menekankan bahwa kepuasan masyarakat bergantung pada kesuksesan pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks Kabupaten Barito Kuala, sebagai daerah dengan karakteristik ekonomi berbasis sektor pertanian dan perikanan, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam memaksimalkan penggunaan anggaran secara efisien dan efektif di tengah keterbatasan sumber daya, jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Selatan yang memiliki kekayaan tambang. Oleh karena itu, penerapan *stewardship theory* menjadi sangat relevan karena menuntut pemerintah untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor-sektor tersebut.

Teori *stewardship* juga memperkuat pentingnya akuntabilitas publik di tingkat lokal. Masyarakat Barito Kuala yang mayoritas berada di pedesaan menaruh harapan besar terhadap pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan peningkatan kualitas hidup. Kepercayaan masyarakat menjadi modal sosial utama yang harus dijaga oleh pemerintah melalui pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan transparan. Dengan demikian, *stewardship theory* tidak hanya menjadi dasar normatif untuk pengelolaan keuangan publik, tetapi juga berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan legitimasi di mata masyarakat.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Menurut Merliana Suprianti et al., (2020) anggaran yang memiliki tujuan yang jelas dan terukur akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengarahkan dan mengelola sumber daya secara efektif, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai maupun organisasi secara keseluruhan. Kejelasan sasaran anggaran juga menjadi instrumen yang dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam konteks transparansi informasi mengenai bagaimana anggaran publik dialokasikan dan direalisasikan. Dalam lingkungan pemerintahan daerah seperti Kabupaten Barito Kuala, di mana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan, kejelasan anggaran menjadi semakin esensial untuk memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kebutuhan prioritas masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Yulianto & Muthaer (2019) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Sasaran anggaran yang dirancang secara spesifik dan realistis memberikan arah yang jelas bagi pelaksana anggaran dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan hasil temuan sebelumnya, penelitian ini mengusulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas menuntut lembaga publik untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Untuk menghindari inefisiensi organisasi, semua proses dalam organisasi harus diperhatikan. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang seminimal mungkin. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang diambil. Tanggung jawab keuangan mengacu pada kewajiban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran uang serta korupsi.

Penelitian Jatmiko (2020) menyatakan Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, yang mana memberi makna bahwa pemerintah sebagai agent (pimpinan) dan rakyat sebagai *principle* (yang dilayani) tentu harus mempertanggungjawabkan kepada BPD/DPRD meliputi rencana kinerja; pengukuran kinerja; dan analisis akuntabilitas kinerja. Dengan adanya penerapan akuntabilitas akan tercipta kinerja instansi yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Auditya et al., 2013) yang menyatakan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Berdasarkan teori dan temuan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

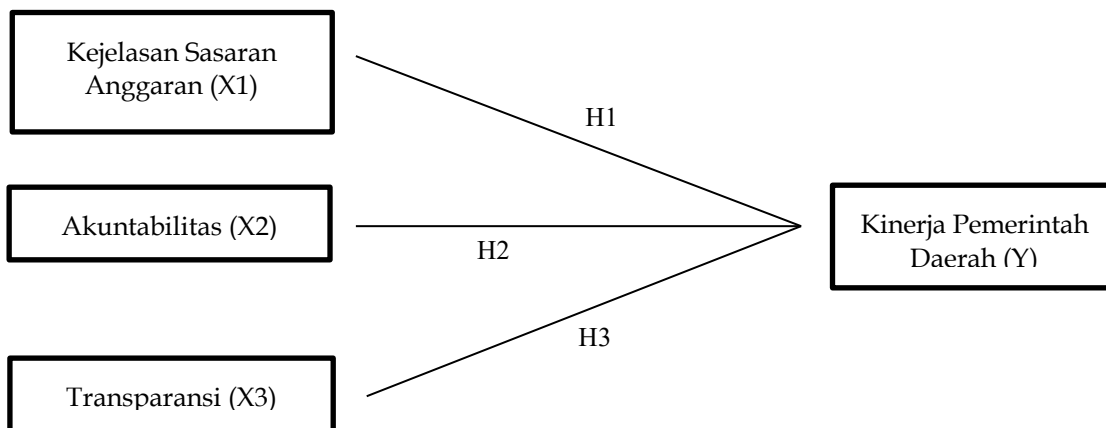
H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah

Transparansi merupakan salah satu elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Sihombing & Arsani (2020), transparansi yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mampu meningkatkan kualitas informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat, baik berupa laporan keuangan maupun non-keuangan. Informasi tersebut disajikan secara tepat waktu, akurat, memadai, dan mudah diakses, sehingga mempermudah para pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam konteks pemerintah daerah, transparansi menjadi sarana penting untuk memastikan penggunaan anggaran dapat diketahui dan dipantau oleh masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Auditya et al., 2013) juga memperkuat temuan ini, di mana transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penyampaian informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan akan memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Berdasarkan penjelasan teori dan temuan empiris sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala.



Gambar 1. Model Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan untuk menganalisis berbagai variabel yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Y) pada SKPD Kabupaten Barito Kuala. Adapun variabel yang diduga dapat mempengaruhi yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X3). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis data primer. Strategi kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penyelidikan yang didasarkan pada logika positivisme, yakni mempertimbangkan populasi atau pengujian tertentu, mengumpulkan data melalui instrumen penelitian, menganalisis informasi dengan memanfaatkan pengukuran kuantitatif, dan tujuannya ialah menguji spekulasi yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2018).

Subjek penelitian ini adalah 44 SKPD Kabupaten Barito Kuala yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala sub bagian dan staf sub bagian keuangan dan perencanaan yang terdiri dari dua orang dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Instrument dalam penelitian ini adalah skala likert, adapun data dihimpun dengan melakukan penyebaran kuisioner online berupa google form dan angket yang diberikan langsung kepada subjek penelitian dimana terdiri dari 80 responden. Adapun definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
1	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan, secara jelas, spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran anggaran diketahui secara jelas dan rinci 2. Besaran anggaran yang disusun sama dengan besaran anggaran yang direalisasikan 3. Penggunaan anggaran sesuai dengan SOP 	Anjarwati (2012)
2	Akuntabilitas (X2)	Akuntabilitas/ Tanggung jawab merupakan komitmen pemberi amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, memperlihatkan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi kewajibannya kepada pemberi amanah (prinsipal) yang berwenang dan ahli untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum 2. Akuntabilitas proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan 	
3	Transparansi (X3)	Transparansi keuangan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara terbuka dan jujur kepada masyarakat melalui media dengan menyajikan laporan keuangan yang tersedia kepada berbagai pemangku kepentingan, dengan ketentuan masyarakat berhak mengetahui informasi tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informatif 2. Keterbukaan 3. Pengungkapan 	Mardiasmo (2018)
4	Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Kinerja sektor publik adalah hasil yang dapat diukur secara kuantitatif dan terukur dari kegiatan/program yang ingin dicapai atau dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran secara kualitatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan (Input) 2. Proses 3. Keluaran 4. Hasil 5. Manfaat 6. Dampak 	Mahsun (2018a)

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$\gamma = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

α = Konstanta

X1 = Kejelasan Sasaran Anggaran

X2 = Akuntabilitas

X3 = Transparansi

β_1 = Koefisien Regresi Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran

β_2 = Koefisien Regresi Variabel Akuntabilitas

β_3 = Koefisien Regresi Variabel Transparansi

e = Standard Error

Namun sebelum melakukan analisis regresi linear berganda penulis harus melakukan uji instrumen berupa uji validitas dan uji reabilitas. Uji validitas adalah ukuran keabsahan suatu instrumen, dimana suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang ingin diukurnya (Mahsun dkk., 2013). Sedangkan uji reabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa konsisten hasil pengukuran apabila dilakukan lebih dari dua kali dengan gejala yang sama dan alat ukur yang sama (Ghozali, 2006). Setelah dilakukan uji instrumen maka harus dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas dan linearitas. Jika hasil uji tersebut menunjukkan bahwa variabel penelitian terbebas dari masalah asumsi klasik barulah uji analisis regresi linear berganda dapat dilakukan. Jika peneliti sudah melakukan analisis regresi linear berganda maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian evaluasi akhir berupa uji koefisien determinasi (Uji R²), uji kelayakan model (uji f) dan uji parsial (uji t). Pengujian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi statistik SPSS versi 25.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu kabupaten di Daerah Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Marabahan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.996,46 km² dan terbagi dalam 17 kecamatan dengan 195 kelurahan dan 6 kecamatan. Kabupaten Barito Kuala merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar. Pada tanggal 4 Januari 1960, Pemerintah Kalimantan Selatan (almarhum Bapak Syarkawi) meresmikan Kabupaten Barito Kuala Tingkat II di Marabahan, sehingga hingga saat ini tanggal 4 Januari diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala memiliki peribahasa, yaitu kata mutiara “BAHALAP” yang artinya Bersih, Harum, Langkar, dan Pantas.

Karakteristik Responden

Data yang digunakan diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada responden kepada 44 SKPD di Kabupaten Barito Kuala secara langsung dan melalui *google form* dan angket, jumlah kuesioner yang disebarikan sebanyak 88 Kuesioner. Peneliti menyajikan sebagai berikut:

Tabel 3 Sampel Dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Penyebaran Kuesioner	88	100%
Kuesioner yang Kembali	72	82%
Kuesioner yang tidak kembali	16	18%
Kuesioner yang dapat diolah	72	82%

Sumber : data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa dari 88 survei yang disebarikan, terdapat 72 kuisisioner yang kembali. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengembalian kuisisioner sebesar 82%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian survei di SKPD Kabupaten Barito Kuala sangat tinggi. Kemudian karakteristik responden dipisahkan lagi berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lama masa kerja. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4 Karakteristik Responden Penelitian

Kategori Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase	
Jenis Responden	Kelamin Laki-Laki	39	54%
	Perempuan	33	46%
	Jumlah	72	100%
Usia Responden	18 - 25 Tahun	4	6%
	26 - 35 Tahun	12	16%
	36 - 45 Tahun	33	46%
	>45 Tahun	23	32%
	Jumlah	72	100%
Tingkat Pendidikan	SLTA	6	8%

	DIPLOMA	16	22%
	S1	42	59%
	S2	8	11%
	Jumlah	72	100%
Lama Kerja	1 - 10 Tahun	19	26%
	11- 20 Tahun	40	56%
	21 - 30 Tahun	12	17%
	>30Tahun	1	1%
	Jumlah	72	100%

Sumber : data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa kebanyakan responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 39 responden (54%) dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 33 responden (46%). Sedangkan jika responden dilihat berdasarkan karakteristik usia diketahui bahwa mayoritas responden berusia 36-46 tahun sebanyak 33 responden (46%) dan minoritas responden berusia 18-25 tahun sebanyak 33 responden (6%).

Diketahui pula bahwa jumlah responden berdasarkan jenjang pendidikan terbanyak adalah responden yang menempuh pendidikan dengan kategori Sarjana (S1) sebanyak 42 responden atau 59%, Diploma sebanyak 16 responden atau 22%, Magister (S2) sebanyak 8 responden atau 11%, dan kategori Sekolah Menengah Atas (SLTA) sebanyak 6 responden atau 8%. Sedangkan jumlah responden berdasarkan lama masa kerja lebih banyak pada kategori 11-20 tahun sebanyak 40 responden atau 56%, lama masa kerja pada kategori 1-10 tahun sebanyak 19 responden atau 26%, lama masa kerja pada kategori 21-30 tahun sebanyak 12 responden atau 17%, dan lama masa kerja pada kategori >30 tahun sebanyak 1 responden atau 1%.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Berikut merupakan tabel statistik deskriptif penelitian :

Tabel 5 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	72	25.00	40.00	34.8889	3.41313
Akuntabilitas (X2)	72	32.00	50.00	44.5000	4.45952
Transparansi (X3)	72	17.00	35.00	29.3333	3.89293
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	72	27.00	45.00	39.0833	4.15458
Valid N (listwise)	72				

Sumber: data diolah melalui SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dengan nilai minimum sebesar 25 dan nilai maksimumnya sebesar 40. Untuk nilai rata-rata variabel Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 34.88 yang berarti dari seluruh responden rata-rata menjawab sebesar 34.88. Standar deviasi pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai 3.41313 yang berarti ukuran penyebaran data atas variabel Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 3.41313 dari 72 responden. Sedangkan variabel Akuntabilitas (X2) dengan nilai minimum sebesar 32 dan nilai maksimumnya sebesar 50. Untuk nilai rata-rata variabel Akuntabilitas sebesar 44.50 yang berarti dari seluruh responden rata-rata menjawab sebesar 44.50. Standar deviasi pada variabel Akuntabilitas memiliki nilai 4.45952 yang berarti ukuran penyebaran data atas variabel Akuntabilitas sebesar 4.45952 dari 72 responden.

Nilai statistik deskriptif variabel Transparansi (X3) dengan nilai minimum sebesar 17 dan nilai maksimumnya sebesar 35. Untuk nilai rata-rata variabel Transparansi sebesar 29.33 yang berarti dari seluruh responden rata-rata menjawab sebesar 29.33. Standar deviasi pada variabel Transparansi memiliki nilai 3.89293 yang berarti ukuran penyebaran data atas variabel Transparansi sebesar 3.89293 dari 72 responden. Sedangkan variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dengan nilai minimum sebesar 27 dan nilai maksimumnya sebesar 45. Untuk nilai rata-rata variabel Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 39.08 yang berarti dari seluruh responden rata-rata menjawab sebesar 39.08. Standar deviasi pada variabel Kinerja Pemerintah Daerah memiliki nilai 4.15458 yang berarti ukuran penyebaran data atas variabel Akuntabilitas sebesar 4.15458 dari 72 responden.

Uji Validitas dan Reabilitas

Pilot Test

Sebelum kuesioner disebarikan pada responden, peneliti telah melakukan *pilot test* yang mana digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Kuesioner diuji coba terlebih dahulu kepada 10 pegawai SKPD yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Berikut merupakan hasil *pilot test*:

Tabel 6 Karakteristik Responden *Pilot Test*

Responden	Jumlah Responden	Persentase
SKPD Kabupaten Batola	10	100%
Kuesioner	Jumlah Responden	Persentase
Kuesioner Kembali	10	100%
Usia	Jumlah Responden	Persentase
26-56 Tahun	10	100%

Sumber: data kuesioner penelitian *Pilot Test*, 2024

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa responden SKPD Barito Kuala berjumlah 10 responden, hasil survei yang kembali sebanyak 10 atau 100% dan rata-rata usia responden adalah 26-56 tahun. Selain itu, hasil survei uji coba diuji keabsahan dan kualitasnya dengan menggunakan SPSS versi 25. *Pilot test* dilakukan sebanyak 1 kali, selama pengujian tersebut terdapat beberapa instrumen pertanyaan yang tidak bisa dijadikan alat ukur karena selama proses *pilot test* hasil pengujian menunjukkan hasil yang tidak valid dan reliabel sehingga instrumen pertanyaan tersebut dihapus dalam penelitian ini.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai keabsahan suatu survei. Suatu survei dikatakan substansial jika pertanyaan-pertanyaan pada survei tersebut mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh survei tersebut. Berikut ini adalah hasil uji validitas dari faktor-faktor penelitian:

Tabel 7 Hasil Uji Validitas

Variabel	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)			
X1.1	0.712	0.2319	Valid
X1.2	0.716	0.2319	Valid
X1.3	0.771	0.2319	Valid
X1.4	0.558	0.2319	Valid
X1.5	0.721	0.2319	Valid
X1.6	0.795	0.2319	Valid
X1.7	0.786	0.2319	Valid
X1.8	0.650	0.2319	Valid
Akuntabilitas (X2)			
X2.1	0.716	0.2319	Valid
X2.2	0.775	0.2319	Valid
X2.3	0.809	0.2319	Valid
X2.4	0.847	0.2319	Valid
X2.5	0.722	0.2319	Valid
X2.6	0.725	0.2319	Valid
X2.7	0.791	0.2319	Valid
X2.8	0.798	0.2319	Valid
X2.9	0.791	0.2319	Valid
X2.10	0.760	0.2319	Valid
Transparansi (X3)			
X3.1	0.811	0.2319	Valid
X3.2	0.785	0.2319	Valid
X3.3	0.822	0.2319	Valid
X3.4	0.724	0.2319	Valid
X3.5	0.671	0.2319	Valid

Variabel	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X3.6	0.920	0.2319	Valid
X3.7	0.792	0.2319	Valid
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)			
Y.1	0.823	0.2319	Valid
Y.2	0.828	0.2319	Valid
Y.3	0.826	0.2319	Valid
Y.4	0.812	0.2319	Valid
Y.5	0.840	0.2319	Valid
Y.6	0.888	0.2319	Valid
Y.7	0.880	0.2319	Valid
Y.8	0.736	0.2319	Valid
Y.9	0.736	0.2319	Valid

Sumber: data diolah melalui SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 8 diatas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa untuk variabel kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah, tidak terdapat pernyataan yang tidak valid. Semua variabel memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel, sehinggannya semua item pernyataan yang digunakan dalam variabel ini dianggap layak atau valid.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen pengukuran dapat diandalkan atau dapat dipercaya dalam mengukur suatu objek yang akan diukur. Dengan melakukan pengujian ini dapat menunjukkan konsistensi jawaban responden dari waktu ke waktu.

Tabel 8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0.862	0,7	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0.925	0,7	Reliabel
Transparansi (X3)	0.899	0,7	Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0.939	0,7	Reliabel

Sumber: data diolah melalui SPSS 25, 2024

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian memiliki nilai *cronbach Alpha* 0,70 oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap indikator dari variabel tersebut dapat dianggap reliabel.

Uji Normalitas

Berikut merupakan tabel hasil uji normalitas :

Tabel 9 Hasil Uji Normalitas Kologrov-Smirnov

<i>Unstandardized Residual</i>		
N		72
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2.37649121
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.098
	<i>Positive</i>	.077
	<i>Negative</i>	-.098
<i>Test Statistic</i>		.098
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.082 ^c

Sumber: data diolah melalui SPSS 25, 2024

Dilihat dari hasil uji normalitas semua faktor yang memanfaatkan perhitungan *Kologrov-Smirnov*, nilai signifikan asimtotik (2-tailed) di atas lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel terdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 10 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.925	2.094		1.397	.167
	X1	-.128	.082	-.273	-1.550	.126
	X2	.062	.063	.174	.993	.324
	X3	.018	.064	.043	.274	.785

Sumber: data diolah melalui SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 11 diatas diketahui bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala heterskedastisitas, karena signifikansi variabel X1 terhadap absolut residual sebesar 0.126 > 0.05, Signifikansi variabel X2 terhadap absolut residual sebesar 0.324 > 0.05, dan signifikansi variabel X3 terhadap absolut residual sebesar 0.785 > 0.05. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa data yang dimiliki tidak mengalami heteroskedastisitas karena semua nilai signifikansi variabel diketahui diatas 0.05.

Uji Multikolinearitas

Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas :

Tabel 11 Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.791	3.176		.564	.575		
	X1	.488	.125	.401	3.900	.000	.456	2.192
	X2	.365	.095	.392	3.843	.000	.463	2.158
	X3	.138	.097	.129	1.416	.161	.577	1.734

Sumber: data diolah melalui SPSS 25, 2024

Pada tabel 12 terdapat hasil uji moltikolonieritas menunjukkan bahwa niali *tolerance* dan VIF dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) adalah sebesar 0.456 dan 2.192, untuk variabel Akuntabilitas (X2) sebesar 0.463 dan 2.158, sedangkan variabel Transparansi (X3) adalah sebesar 0.577 dan 1.734. Kesimpulan yang didapat yaitu semua variabel memiliki nilai *tolerance* ≥ 0.10 dan nilai VIP < 10 sehingga tidak ada yang mengandung masalah multikolonieritas atau tidak ada korelasi antar variabel-variabel bebas.

Uji Analisis Linear Berganda

Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi dapat dilihat dari nilai-nilai koefisien dan tingkat signifikan masing-masing variabel pada sebuah kerangka analisis, sebagai berikut:

$$y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$$

$$y = 1.791 + 0.488X_1 + 0.365X_2 + 0.138X_3 + \epsilon$$

Persamaan regresi Linear berganda diatas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Konstanta a sebesar 1.791 dapat diartikan bahwa apabila kejelasan sasaran anggaran (X1), akuntabilitas (X2), dan transparansi (X3) bernilai nol (tidak ada) maka Y (Kinerja Pemerintah Daerah) bernilai sebesar 1.791 satuan.
- b. Koefisien regresi kejelaan sasaran anggaran (β_1) sebesar 0.488, menyatakan bahwa apabila variabel kejelasan sasaran anggaran meningkat maka kinerja Pemerintah Daerah Barito Kuala akan meningkat sebesar 0,488.
- c. Koefisien regresi akuntabilitas (β_2) sebesar 0.365, menyatakan bahwa apabila variabel akuntabilitas meningkat maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala akan meningkat sebesar 0.365.

- d. Koefisien regresi transparansi (β_3) sebesar 0.138, menyatakan bahwa apabila variabel transparansi meningkat maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala akan meningkat sebesar 0.138.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut merupakan tabel hasil uji R^2 :

Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820 ^a	.673	.658	2.428

Sumber: data diolah melalui SPSS 25, 2024

Berdasarkan pada tabel 13 diketahui nilai *Adjust R Square* sebesar 0.658 menunjukkan bahwa 65.8% sumbangan pengaruh variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran (X1), akuntabilitas (X2), transparansi (X3) terhadap variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah secara simultan (bersama-sama), sedangkan 34.2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Uji F

Berikut merupakan hasil uji f :

Tabel 13 Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	824.513	3	274.838	46.607	.000 ^b
	Residual	400.987	68	5.897		
	Total	1225.500	71			

Sumber: data diolah melalui SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 14 menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 46.607 dimana F_{tabel} sebesar 2.737 serta tingkat signifikansinya 0,000. Dapat disimpulkan nilai F_{hitung} sebesar 46.607 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2.737 serta tingkat signifikansi $0.00 < 0.05$ sehingga model dapat diterima dan secara simultan, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Selain itu pada nilai signifikan yang kurang dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa model penelitian FIT (*goodness of fit*).

Uji T

Berikut merupakan hasil uji t :

Tabel 14 Hasil Uji T

Variabel	T_{hitung}	T_{tabel}	Sig.	Keterangan
(Constant)	0.564		0.575	
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	3.900	1.995	0.000	H1 diterima
Akuntabilitas (X2)	3.843	1.995	0.000	H2 diterima
Transparansi (X3)	1.416	1.995	0.161	H3 ditolak

Sumber: data diolah melalui SPSS 25, 2024

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 5.23 dideskripsikan sebagai berikut:

- H1: sig X1 terhadap Y adalah 0,000 $t_{hitung} > t_{tabel}$ 1,995 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti ada pengaruh X1 terhadap Y.
- H2: sig X2 terhadap Y adalah 0,000 $t_{hitung} > t_{tabel}$ 1,995 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti ada pengaruh X2 terhadap Y.
- H3: sig X3 terhadap Y adalah 0,161 $> 0,05$ dan t_{hitung} 1,416 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y.

Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah menyatakan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis (H1) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada kejelasan sasaran anggaran (X1) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Temuan ini relevan mengingat Kabupaten Barito Kuala memiliki ketergantungan yang tinggi pada alokasi APBD untuk sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan mayoritas penduduknya.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori *stewardship*, yang mana teori *stewardship* menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dalam hal ini pemerintah selaku *steward* sebagai pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* sebagai pemilik sumber daya memiliki kesepakatan berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Kejelasan sasaran anggaran membantu pemerintah untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam mencapai tingkat kinerja yang sudah ditetapkan sehingga terjadinya peningkatan dalam hasil kinerja dan tercapainya tujuan organisasi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Desiana et al., 2018; Wulandari et al., 2017; Yulianto & Muthaher, 2019b)

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah menyatakan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis (H2) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada akuntabilitas (X2) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). Akuntabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Barito Kuala mencerminkan bahwa meskipun daerah ini memiliki keterbatasan pendapatan asli daerah, upaya pemerintah dalam menjaga pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian predikat SAKIP 'B' yang konsisten diraih pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Auditya et al., 2013; A. Jatmiko, 2009) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk mengungkapkan semua kegiatan dan fungsi yang berada dibawah tanggung jawabnya. Dengan demikian masyarakat dapat melihat bagaimana anggaran daerah digunakan dan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menerapkan prinsip tanggung jawab, pengurus harus memikul tanggung jawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua tindakan atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengurus. Oleh karena itu, semakin besar tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

Hasil jawaban responden dalam kuesioner pada dasarnya sudah menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah melaksanakan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggunakan dasar kejujuran dan hukum untuk penyusunan dan penggunaan anggarannya sehingga dapat menghindari penyalahgunaan jabatan yang tidak diinginkan dan dapat mencapai hasil kinerja yang diharapkan. Hasil penelitian diatas juga sejalan dengan teori *stewardship* yang mana dalam konteks organisasi sektor publik akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (*principal*) dengan mengungkapkan segala informasi baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah menyatakan bahwa hasil penelitian ini menolak hipotesis (H3) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh pada transparansi (X3) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian Binawati dkk. (2022) yang mengatakan bahwa variabel transparansi

tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh konteks lokal di mana sebagian masyarakat Barito Kuala memiliki keterbatasan akses terhadap informasi publik, baik karena infrastruktur teknologi informasi yang belum merata maupun rendahnya literasi anggaran di kalangan masyarakat pedesaan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2, bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Walaupun sudah adanya regulasi yang mendukung dalam kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi publik menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan publik untuk tidak atau bahkan menghalang-halangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia. Akan tetapi, selama melakukan penelitian, peneliti tetap kesulitan dalam mengakses atau mendapatkan dokumen publik berupa LAKIP dan RENSTRA sebagai tambahan data dalam melakukan penelitian. Hal ini, menunjukkan masih terdapat minimnya informasi terkait keterbukaan informasi yang ada di badan publik dan ketidakmudahan dalam mengakses dokumen publik pada pemerintahan Kabupaten Barito Kuala.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian menunjukkan bahwa ketika sasaran anggaran didefinisikan dengan jelas, detail, dan menyeluruh, serta disesuaikan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD), maka pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien; Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel akuntabilitas (X2) dengan kinerja pemerintah daerah (Y); Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Maka dalam penelitian ini ada dan tidaknya transparansi tidak akan mempengaruhi tingkat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala.

Hasil penelitian ini mengimplikasikan bagaimana kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala yang berguna bagi bidang akuntansi. Penelitian ini berkontribusi pada literatur akuntansi dengan memberikan wawasan baru tentang kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, berpotensi menginspirasi penelitian lanjutan dan pengembangan konsep baru dalam bidang ini.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu dokumen RENSTRA, RENJA, dan LAKIP sebagai data tambahan dalam penelitian ini susah untuk di akses padahal merupakan bagian dari dokumen public. Tingkat respon rate cukup tinggi tetapi jumlah sampel masih tergolong kecil. Maka peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti pada lingkup eksternal/persepsi eksternal terkait kinerja pemerintah daerah agar mendapatkan hasil yang komprehensif atau menyeluruh.

Referensi

- Ambarwati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan Accounting Information System sebagai Pemoderasi. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 6(3), 88–96. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v6i3.128>
- Andrews, M., & Hill, H. (2003). The impact of traditional budgeting systems on the effectiveness of performance-based budgeting: A different viewpoint on recent findings. *International Journal of Public Administration*, 26(2), 135–155. <https://doi.org/10.1081/PAD-120018299>
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 1(2). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aa>

- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *JURNAL FAIRNESS*, 3(1), 21–42. <https://doi.org/10.33369/FAIRNESS.V3I1.15274>
- Binawati, E., Badriyah, N., Akuntansi, J., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Bisnis Indonesia, S. (2022a). Enita Binawati Nurul Badriyah. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Wiya Wiwaha* (Vol. 2, Issue 1).
- Binawati, E., Badriyah, N., Akuntansi, J., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Bisnis Indonesia, S. (2022b). Enita Binawati Nurul Badriyah. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Wiya Wiwaha* (Vol. 2, Issue 1).
- Bovens, M. A. P. ., Goodin, R. E. ., & Schillemans, Thomas. (2014). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Desiana, D., Susilowati, D., & Putri, N. K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Di Kota Tasikmalaya. *Akuntabilitas*, 11(1), 75–90. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8135>
- Ezzamel, M., Hyndman, N., Johnsen, A., & Lapsley, I. (2014). Reforming central government: An evaluation of an accounting innovation. *Critical Perspectives on Accounting*, 25(4–5), 409–422. <https://doi.org/10.1016/J.CPA.2013.05.006>
- Fukuyama, F. (2013). What Is Governance? *Governance*, 26(3), 347–368. <https://doi.org/10.1111/GOVE.12035>
- Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1). <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>
- Hasanah, A. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan)*.
- Hodge, G. A., & Greve, C. (2007). Public-Private Partnerships: An International Performance Review. *Public Administration Review*, 67(3), 545–558. <https://doi.org/10.1111/J.1540-6210.2007.00736.X>
- Hood, C. (2010). Accountability and Transparency: Siamese Twins, Matching Parts, Awkward Couple? *West European Politics*, 33(5), 989–1009. <https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486122>
- Jatmiko, A. (2009). *Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2000-2009*. repository.ubaya.ac.id. <http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/32914>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Kenis, I. (1979). Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *American Accounting Association*, 54(4), 707–721.
- Laksana, A. P., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Batang. In *AAJ* (Vol. 3, Issue 2). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Andre Purwanugraha, H. (2013). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Ketiga). BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Merliana Suprianti, M., Wulandari, R., & Sari, A. R. (2020). Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.21067/JRMA.V8I1.4453>
- Mulyadi AR, Syamsidar, & Dedy Efendy. (2018). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja

- Pemerintah Aceh). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2). <http://www.acehnews.net/mata-catat18-skpa-di->
- Pratiwy Suwandy, A. (2013). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang)*.
- Qodariah, L. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan Dan keindahan Kota Palembang*.
- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2020). Pengaruh Transparansi, LKPD Dan PAD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ecodemica*, 4(2). <https://doi.org/10.31311/jeco.v4i2.8108>
- Sirande, G. M., Wuriasih, A., Werimon, S., Malino, M., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Papua, U. (2022). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari)*. 16, 16–34.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, W. R., Surya, R. A. S., & Paulus, S. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penekanan Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 16–29. <https://www.neliti.com/publications/126502/>
- Yulianto, A. R., & Muthaher, O. (2019a). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelapor Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. *Tirtayasa Ekonomika*, 14.
- Yulianto, A. R., & Muthaher, O. (2019b). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 14(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jte.v14i2.6478>